



## Strategi Pengelolaan media sosial sebagai Sarana Publikasi Informasi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung

Ni Nyoman Setyawati Tangkas

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Program Studi Administrasi Publik Universitas Udayana



Correspondence: [putriwirantari@unud.ac.id](mailto:putriwirantari@unud.ac.id)

### Abstrak

Di era digital saat ini, media sosial telah berkembang menjadi salah satu instrumen komunikasi pemerintah yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, cepat, dan interaktif. Pemanfaatannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai wadah pembentukan opini publik serta peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan media sosial sebagai sarana publikasi informasi pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Analisis penelitian difokuskan pada tiga aspek utama sesuai dengan teori Paramitha (2011), yaitu perencanaan, pengawasan, dan optimalisasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Badung menerapkan strategi komunikasi yang terencana melalui penentuan gaya bahasa, penyusunan desain visual, pemetaan audiens, serta klasifikasi konten berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pengawasan dilakukan melalui pemilihan konten pembeda dan penyesuaian informasi dengan isu-isu aktual. Optimalisasi dilaksanakan melalui evaluasi konten sebelum publikasi untuk menjamin akurasi dan kualitas informasi. Secara keseluruhan, pengelolaan media sosial yang diterapkan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, penguatan citra pemerintah daerah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat.

Kata kunci: media sosial, publikasi informasi, komunikasi pemerintah, strategi pengelolaan, Diskominfo Badung

### Abstract

*In the current digital era, social media has evolved into one of the most effective communication tools for governments in disseminating information quickly, widely, and interactively. Its utilization plays an important role not only in information delivery but also in shaping public opinion and enhancing governmental transparency. In this context, this study aims to analyze social media management strategies used as a medium for government information dissemination at the Department of Communication and Informatics of Badung Regency. The analysis focuses on three key aspects proposed by Paramitha (2011), namely planning, supervision, and optimization. This study employs a descriptive qualitative method through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that Diskominfo Badung implements a well-structured communication strategy through language selection, visual design, audience mapping, and content classification based on public needs. Supervision is conducted through the selection of distinctive content and adjustment of information to current issues. Optimization is carried out through content evaluation prior to publication to ensure accuracy and quality. Overall, the implemented social media management strategies have contributed positively to enhancing transparency, strengthening the government's public image, and increasing public engagement.*

*Keywords: social media, public information, government communication, management strategies, Diskominfo Badung.*

### I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini memberikan dampak penting terhadap interaksi sosial, ekonomi, politik, serta tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk perkembangan teknologi yang paling signifikan adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai kanal komunikasi publik.

Platform digital ini telah berkembang dari sekadar sarana interaksi antarindividu menjadi instrumen strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan penguatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana publikasi informasi yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan publik modern.

Pentingnya pemanfaatan media sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan sejumlah regulasi nasional yang mengatur keterbukaan informasi, penggunaan teknologi digital dalam birokrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Undang-undang ini menekankan prinsip bahwa masyarakat berhak mengetahui setiap kebijakan publik yang memengaruhi kehidupannya.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat bahwa urusan komunikasi dan informatika merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi publik berada di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diskominfo memiliki kewenangan strategis untuk mengelola penyebaran informasi melalui berbagai media, termasuk kanal digital dan media sosial.

Selain UU tersebut, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memperkuat integrasi teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. SPBE menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Media sosial, sebagai bagian dari ekosistem layanan digital, menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi SPBE, khususnya dalam layanan komunikasi publik, diseminasi informasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah diharapkan hadir secara aktif di ranah digital dan menyajikan informasi yang berkualitas.

Dalam konteks daerah, Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten dengan perkembangan pesat di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sosial kemasyarakatan. Sebagai daerah tujuan wisata internasional, Kabupaten Badung memiliki dinamika informasi yang cepat dan kompleks. Masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya membutuhkan informasi yang akurat, terkini, dan terpercaya mengenai kebijakan pemerintah, perkembangan situasi daerah, program pembangunan, hingga informasi kedaruratan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, untuk menyediakan layanan informasi publik yang responsif melalui platform digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab dalam mengelola komunikasi publik dan publikasi informasi pemerintah melalui media sosial seperti Instagram, Twitter (X), YouTube, dan TikTok. Pemilihan platform ini disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Badung, baik penduduk lokal maupun wisatawan, yang memiliki tingkat konsumsi informasi digital yang tinggi. Platform digital memberikan ruang bagi Diskominfo untuk menyampaikan informasi secara lebih kreatif, interaktif, dan menarik.

Namun, pengelolaan media sosial pemerintah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, tingginya arus informasi di media sosial dapat memicu munculnya hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang mengganggu ketertiban informasi publik. Diskominfo perlu melakukan monitoring, klarifikasi, dan respons cepat terhadap berbagai isu agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Tantangan kedua adalah bagaimana memastikan kualitas konten yang dipublikasikan, baik dari segi akurasi informasi, estetika visual, maupun relevansi konten dengan kebutuhan publik. Konten yang kurang menarik atau kurang informatif dapat mengurangi keterlibatan masyarakat dan menghambat efektivitas komunikasi. Hal ini juga sejalan dengan pengalaman penulis, di mana penulis bersama rekan hanya menggunakan satu perangkat dalam proses pembuatan konten, sehingga tetap berupaya menghasilkan konten yang informatif dan menarik.

Tantangan ketiga adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan respons terhadap konten, seperti memberikan like atau membagikan konten. Minimnya interaksi ini dapat memengaruhi efektivitas komunikasi

pemerintah melalui media sosial. Oleh karena itu, strategi pengelolaan media sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menjadi objek kajian yang penting, untuk menemukan cara meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus menyampaikan informasi publik secara optimal.

Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam pengembangan kebijakan komunikasi publik pemerintah daerah. Dengan memahami strategi yang diterapkan oleh Diskominfo Badung, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai cara pemerintah daerah melakukan publikasi informasi secara profesional, menghadapi tantangan komunikasi digital, dan meningkatkan efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana pelayanan informasi publik. Kajian ini juga memiliki kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu komunikasi pemerintah (*government communication*) dan manajemen media digital di sektor publik. Media sosial sebagai bagian dari komunikasi pemerintah bukan sekadar alat penyampai informasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam membangun citra, meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi publik, dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian mengenai *“Strategi Pengelolaan Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Informasi Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung”* menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan komunikasi publik di Kabupaten Badung, sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola media sosial secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori dari Paramitha (2011) yang menjelaskan pengelolaan media sosial melalui tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pengawasan, dan optimalisasi. Berikut uraian mengenai ketiga aspek tersebut.

### **Perencanaan:**

Perencanaan dalam pengelolaan media sosial mencakup tiga indikator utama. Perencanaan ini menjadi langkah awal proses pengelolaan media sosial guna menciptakan komunikasi yang efektif, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Proses perencanaan meliputi tiga indikator, yaitu:

1. Indikator pertama adalah Penentuan strategi komunikasi, untuk mengintegrasikan komunikator, pesan, saluran (media), serta penerima untuk mencapai hasil komunikasi optimal, dimana hal tersebut akan membantu untuk membuat strategi komunikasi yang terstruktur. (Cangara, 2013:61). Strategi komunikasi tersebut tidak harus menggunakan bahasa atau kata yang formal bisa meliputi penggunaan bahasa sederhana sehari-hari pada konten Instagram Pemerintah Kabupaten Badung. Agar mudah dicerna masyarakat dan menarik minat baca, bisa juga cara penyajian informasinya menggunakan gambar atau animasi, agar tidak hanya orang dewasa yang tertarik, tetapi semua kalangan bisa menikmati dan tertarik untuk membaca. penyajian konten secara kreatif, serta interaksi aktif dengan pengikut melalui fitur-fitur Instagram yang ada juga akan sangat membantu strategi komunikasi.
2. Indikator kedua adalah menentukan target konsumen. Target konsumsi merupakan sekelompok orang yang dijadikan tujuan untuk menerima informasi melalui media sosial. Kabupaten Badung
3. Indikator ketiga adalah pengamatan terlebih dahulu mengenai konten, perencanaan mengenai konten yang akan dipublish di dalam media sosial. Konten tersebut harus berkaitan dengan realita lapangan yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu konten yang akan disajikan harus melalui tahap survei, untuk melihat konten mana yang lebih cocok di publikasi sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat.

### **Pengawasan:**

Pengawasan merupakan proses pelaksanaan yang memiliki dua indikator. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam publikasi di media sosial. Pengawasan memiliki dua indikator, yaitu:

1. Menentukan konten yang menjadi pembeda.

Yang dimaksud dengan konten pembeda dalam proses pengawasan adalah konten yang mampu menarik perhatian masyarakat sehingga mereka tertarik untuk melihat atau membaca informasi yang disampaikan.

2. Membuat konten yang relevan dengan peristiwa yang sedang berlangsung sangat penting. Ketepatan waktu berarti pesan yang disampaikan harus sesuai dengan situasi dan kondisi aktual (Hardjana, 2003:24). Oleh karena itu, konten yang ditampilkan di media sosial Instagram perlu selalu diperbarui mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Adaptasi terhadap berita atau informasi yang sedang tren dapat dilakukan dengan cara yang kreatif dan menarik, sehingga meningkatkan peluang masyarakat untuk melihat konten yang diunggah.

### **Optimalisasi:**

Optimalisasi adalah proses yang mendukung kelancaran pengelolaan media sosial. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap konten yang telah dipublikasikan, yang mencakup satu indikator utama.

1. Evaluasi konten merupakan proses meninjau kembali materi yang akan dipublikasikan di media sosial. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan kualitas konten agar lebih menarik serta disukai oleh masyarakat. Melalui proses penyempurnaan tersebut, konten yang diunggah menjadi lebih informatif dan menarik. Selain itu, evaluasi juga mencakup pengecekan keakuratan informasi yang digunakan, karena sumber informasi yang valid sangat penting dalam penyusunan konten untuk media sosial. Diskominfo Kabupaten Badung berupaya menjadikan media sosial Pemerintah Kabupaten Badung sebagai sarana penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan rutin memperbarui berita serta menerima berbagai masukan dan kritik dari masyarakat.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau konteks tertentu melalui pendekatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan media sosial sebagai sarana publikasi informasi pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Penulis memilih metode ini karena pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan menyeluruh mengenai strategi pengelolaan media sosial yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memahami realitas di lapangan melalui pengamatan langsung, wawancara, observasi, dokumentasi dengan pihak terkait, serta analisis terhadap dokumen dan konten media sosial yang dikelola oleh Diskominfo Badung. Melalui pendekatan tersebut, peneliti juga dapat memahami **faktor-faktor pendukung dan penghambat** dalam pelaksanaan strategi publikasi informasi, termasuk bagaimana instansi menyesuaikan konten dengan kebutuhan masyarakat, merespons isu-isu aktual, serta membangun interaksi yang efektif dengan publik. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif dipandang paling relevan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran media sosial sebagai sarana komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Pengelolaan media sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, serta tepat waktu mengenai berbagai kegiatan, kebijakan, dan layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Melalui fungsi ini, media sosial berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat kepercayaan masyarakat, sekaligus membangun citra positif pemerintah daerah. Dalam mendukung proses publikasi informasi pemerintah melalui media sosial,

penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Paramitha (2011) yang menyebutkan bahwa pengelolaan media sosial mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pengawasan, dan optimalisasi. Ketiga aspek ini menjadi landasan strategis dalam memastikan media sosial mampu berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi pemerintah. Bagi sebuah instansi pemerintahan seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, penerapan ketiga aspek tersebut sangat penting untuk membentuk pola komunikasi yang terarah, konten yang relevan, serta penyampaian informasi yang sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Hasil pengamatan dan pengalaman langsung selama melaksanakan magang menunjukkan bahwa strategi pengelolaan media sosial oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tidak hanya berkaitan dengan proses teknis seperti pembuatan konten, desain visual, dan penjadwalan unggahan, tetapi juga melibatkan langkah-langkah strategis yang menyesuaikan dengan dinamika informasi yang berkembang di masyarakat.

## **1. Aspek perencanaan**

Aspek perencanaan ditunjukkan melalui penyusunan strategi komunikasi, pemilihan gaya penyampaian pesan, perumusan target audiens, serta penentuan jenis konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dimana aspek perencanaan ini memiliki 3 indikator yaitu:

- a. Indikator Penentuan strategi komunikasi, untuk mengintegrasikan komunikator, pesan, saluran (media), dimana seperti yang di katakan oleh Ibu Fuji Rahmawati,S.Kom., M.AP, selaku Pranata Hubungan Masyarakat Ahli muda sekaligus sebagai admin sosial media Diskominfo Badung mengatakan bahwa bahwa “proses penyusunan strategi komunikasi diperlukan pemilihan gaya bahasa, desain visual, serta format penyajian informasi yang sesuai dengan karakter masyarakat Badung dan harus menarik juga biar kontennya gak boring” (8 Desember 2025). Menurut beliau, strategi komunikasi tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dapat dipahami dengan mudah, menarik perhatian, dan mampu membangun keterlibatan masyarakat melalui media sosial. Oleh karena itu, pemilihan konsep konten, pemetaan audiens, dan penentuan metode penyampaian menjadi langkah awal yang penting sebelum sebuah informasi dipublikasikan.
- b. Indikator menentukan target konsumen, dimana pada saat melakukan observasi dan wawancara Ibu Fuji Rahmawati,S.Kom., M.AP, selaku Pranata Hubungan Masyarakat Ahli muda,mengatakan bahwa “target dari penyampaian informasi yang kita sebar luaskan melalui media sosial Diskominfo Badung itu gak untuk masyarakat badung aja gek tapi untuk masyarakat luar juga, contohnya yang adik-adik PKL kerjakan secara rutin, untuk upload konten cuaca di Instagram kominfo, Masyarakat luar Badung juga bisa akses informasi itu lewat Instagram kominfo, jadi gak tertuju kr masyarakat badung aja gek”. Oleh karna itu informasi yang disampaikan oleh Diskominfo Badung merupakan informasi untuk asyarakat luas.
- c. Pengamatan terlebih dahulu mengenai konten, Dimana saat melakukan wawancara bersama Ibu Fuji Rahmawati,S.Kom.,M.A.P. selaku prantara Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Beliau mengatakan bahwa “perlu adanya klasifikasi konten sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konten yang akan di upload dalam media sosial harus mengalami proses pengamatan terlebih dahulu, agar konten yang diupload sesuai dengan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat”.

## **2. Aspek pengawasan**

Aspek pengawasan tercermin dari proses pengecekan, pemilihan informasi yang layak dipublikasikan, serta penyesuaian konten dengan isu-isu yang sedang berkembang agar publikasi tetap up-to-date dan menarik perhatian masyarakat. Aspek pengawasan memiliki dua indikator, yaitu:

- a. Menentukan konten yang menjadi pembeda. Dimana saat melakukan wawancara bersama Ibu Fuji Rahmawati,S.Kom.,M.A.P. selaku prantara Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Beliau mengatakan bahwa “Hal yang juga harus diperhatikan saat mengupload konten adalah perbedaan konten awal dengan sebelumnya-sebelumnya. Seperti saat mengupload konten sosial tentunya templet, isi konten jelas akan berbeda dengan konten animasi lainnya”.

- b. Membuat konten yang relevan dengan peristiwa yang sedang berlangsung sangat penting. Dimana saat melakukan wawancara dengan Ibu Fuji Rahmawati, S.Kom., M.A.P. Selaku Perantara Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Beliau mengatakan bahwa “Kebutuhan konten tidak hanya semata-mata untuk membantu meningkatkan keaktifan Media Sosial, tetapi konten yang di upload harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan, sehingga manfaat dari konten tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat”.

### 3. Aspek optimalisasi

Aspek optimalisasi dilakukan melalui evaluasi konten, penyempurnaan kualitas materi publikasi, serta upaya peningkatan efektivitas penyampaian pesan agar konten yang diunggah mampu memberikan dampak positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan media sosial di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merupakan proses yang tidak hanya menekankan aspek teknis, namun juga menyangkut kemampuan adaptasi dan kepekaan terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Dengan menerapkan perencanaan, pengawasan, dan optimalisasi secara konsisten, media sosial pemerintah mampu berfungsi secara efektif sebagai sarana publikasi yang mendukung transparansi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memperkuat citra positif Pemerintah Kabupaten Badung. Optimalisasi memiliki satu indikator yaitu:

- a. Evaluasi konten merupakan proses meninjau kembali materi yang akan dipublikasikan di media sosial. Dimana saat melakukan wawancara dengan Ibu Fuji Rahmawati, S.Kom., M.A.P. Selaku Perantara Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Beliau mengatakan bahwa “sebelum konten di upload harus melewati evaluasi konten terlebih dahulu, karena sebelum konten dilihat oleh masyarakat pihak internal harus melihat terlebih dahulu, apakah isi konten sudah sesuai dengan apa yang harus di upload. Agar apa yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat umum di lapangan”.

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengelolaan media sosial sebagai sarana publikasi informasi pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah. Pengelolaan media sosial yang dilakukan oleh Diskominfo Badung menunjukkan adanya upaya sistematis, terencana, dan adaptif untuk memastikan bahwa informasi publik dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pertama, pada aspek perencanaan, Diskominfo Badung telah melakukan perumusan strategi komunikasi yang komprehensif, meliputi pemilihan gaya bahasa yang informatif dan mudah dipahami, pemanfaatan desain visual yang menarik, serta pemetaan audiens agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif. Selain itu, proses klasifikasi konten dan pengamatan awal terhadap kebutuhan informasi masyarakat menjadi langkah penting dalam menjamin bahwa konten yang dipublikasikan memiliki relevansi tinggi dengan dinamika sosial di lapangan.

Kedua, pada aspek pengawasan, pelaksanaan monitoring dan peninjauan konten dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa setiap materi publikasi layak dipublikasikan dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek estetika atau format penyajian, tetapi juga pada akurasi informasi dan kesesuaiannya dengan isu aktual. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab institusional untuk menjaga kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah.

Ketiga, pada aspek optimalisasi, evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum konten dipublikasikan. Evaluasi ini melibatkan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, ketepatan makna, serta kesesuaian dengan tujuan komunikasi publik pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang diunggah

mampu memberikan pemahaman yang benar, menghindari potensi misinformasi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan media sosial yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan citra pemerintah daerah. Media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga menjadi sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat memperkuat hubungan komunikatif yang partisipatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengembangkan strategi pengelolaan media sosial yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

## Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. [E-book]. ISBN: 978-623-9753-3-6.
- Azizah, U. (2024). *Pengelolaan media sosial Instagram pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi Kota Balikpapan* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Fazarusda, A., & Indrayani, H. (2020). Strategi komunikasi pelayanan publik melalui e-government di Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Kota Semarang. *IMPRESI: Jurnal Ilmiah Media, Public Relations, dan Komunikasi*, 1(1), 1–11.
- Leliana, I., & Gogali, V. A. (2019). Strategi humas Kementerian Perindustrian dalam menginformasikan layanan publik melalui YouTube. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung*, 6(2), 110–119.
- Supriyanto, D., Nuryanti, N., & Noegroho, A. (2024). Media sosial dalam efektivitas komunikasi pelayanan publik instansi pemerintah daerah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 7796–7810.
- Zharfan, S. Z., Rudiana, R., & Centia, S. (2024). Perencanaan komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan konten media sosial untuk meningkatkan pelayanan publik Diskominfo Jabar. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*, 7(4), 240–253.